

Judul : Israel gasak tepi barat, tidak selan dengan semangat perdamaian
Tanggal : Jumat, 27 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Israel Gasak Tepi Barat

Tidak Sejalan Dengan Semangat Perdamaian

KETUA BKSAP DPR Syahrul Aidi Maazat mendukung sikap Menlu Sugiono dan 18 menlu negara lain yang mengancam perluasan kendali Israel di Tepi Barat. Langkah itu dinilai melanggar hukum internasional dan bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

Syahrul menilai, tindakan Israel itu makin menegaskan adanya pola kebijakan yang tidak sejalan dengan semangat perdamaian dan penyelesaian konflik secara adil. Perluasan wilayah di kawasan pendudukan bukan hanya memperburuk situasi kemanusiaan, tapi juga mengikis kepercayaan terhadap proses perdamaian yang selama ini diperjuangkan masyarakat internasional.

"Dunia tidak boleh menutup mata terhadap kejahatan yang terus berulang dan menghambat terwujudnya kemerdekaan Palestina," ujar Syahrul dalam keterangannya, Rabu (25/2/2026).

BKSAP memandang, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional harus tetap mencerminkan sikap tegas terhadap penjajahan. Keberpihakan terhadap kemerdekaan Palestina

tidak boleh bergeser sedikit pun.

Langkah sepihak yang diambil Israel, kata politikus PKS itu, menunjukkan indikasi minimnya komitmen terhadap perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Penyelesaian konflik hanya dapat tercapai apabila ada penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina serta penghentian seluruh bentuk ekspansi di wilayah pendudukan.

Dia mengingatkan amanat para pendiri bangsa yang secara tegas menempatkan dukungan terhadap kemerdekaan seluruh bangsa sebagai bagian dari prinsip konstitusional. Palestina, sebagai salah satu negara yang memberikan pengakuan awal terhadap Indonesia, memiliki posisi historis dan moral yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan diplomasi Indonesia.

"Dukungan terhadap Palestina bukan hanya soal politik luar negeri, tapi juga soal amanah sejarah dan komitmen moral bangsa Indonesia," ujar legislator yang juga anggota Komisi I DPR itu.

Kecaman terhadap rencana perluasan wilayah Israel di Tepi Barat juga disampaikan anggota



Syahrul Aidi Maazat

Komisi I DPR Syamsu Rizal. Langkah Israel yang menyetujui proposal klaim kepemilikan tanah di wilayah itu merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

Menurut Syamsu, langkah itu adalah yang pertama sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat pada tahun 1967. Kebijakan itu semakin mempertegas praktik aneksasi dan memperburuk konflik berkepanjangan di kawasan tersebut. Keputusan itu merupakan bentuk nyata aneksasi terhadap tanah Palestina dan tidak dapat dibenarkan dalam

hukum internasional.

"Langkah Israel itu betul-betul aneksasi terhadap tanah Palestina. Ini adalah penjajahan atau kolonialisme nyata yang tidak boleh dibiarkan," tegas politikus PKB itu.

Dia mengatakan, Israel secara sepihak mencaplok tanah milik masyarakat Palestina tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar warga yang telah lama bermukim di wilayah itu. Tindakan itu berpotensi memicu eskalasi ketegangan dan menghambat upaya perdamaian yang selama ini diperjuangkan masyarakat internasional.

Karena itu, dia mendorong Pemerintah untuk bersikap tegas dan lantang bersuara untuk menolak penjajahan itu. Indonesia harus memanfaatkan keanggotaannya di Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) untuk menekan Israel, sesuai dengan amanat konstitusi untuk menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan di berbagai forum internasional. Termasuk melalui diplomasi

aktif dan dukungan terhadap resolusi-resolusi yang berpihak pada kedaulatan Palestina. Dunia internasional juga harus menyerukan solidaritas untuk menghentikan praktik aneksasi itu. "Dunia juga harus memastikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat Palestina sesuai prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia," ucapnya.

Sebelumnya, Menlu Sugiono mengutuk keras serangkaian keputusan Israel yang memperluas kendali yang melanggar hukum atas Tepi Barat. Keputusan yang mengklasifikasi kembali tanah Palestina sebagai "tanah negara" Israel itu dianggap mempercepat aktivitas pemukiman ilegal dan semakin memperkuat administrasi Israel.

Dalam pernyataan bersama, para menlu juga menegaskan bahwa pemukiman ilegal Israel serta berbagai keputusan yang mendorong perluasannya merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Sikap itu menunjuk pada berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB serta Opini Penasihat Mahkamah Internasional tahun 2024. ■ PYB